

Laporan Kinerja Tahun 2025



Dinas Perhubungan
Kab. Tanah Laut



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sepantasnya kita haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kuasa dan ijin-Nya jualah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat diselesaikan pada waktunya. LKj tersebut merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 2025-2029.

LKj dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli akan kinerja instansinya sehingga akan memperoleh manfaat dari LKj ini, dan dapat dipakai untuk melaksanakan strategi guna meningkatkan kinerja instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Akhirnya kami mengharapkan agar LKj ini oleh setiap jajaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut khususnya dan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada umumnya dapat dijadikan bahan oleh para perencana/penata program untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaihari, Pebruari 2026

Kepala Dinas,


Tedy Mulyana, ST, MT
NIP. 19800617 200501 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan ini merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025–2029.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan strategis yaitu **meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas kabupaten/kota**. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu **meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas** serta **meningkatnya pelayanan angkutan umum**, yang diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), meliputi *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)*, *Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi*, dan *Persentase Daerah yang Terlayani Transportasi Umum*.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut didukung anggaran sebesar **Rp. 45.009.139.311,00** yang dialokasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Program Pengelolaan Pelayaran. Alokasi anggaran terbesar difokuskan pada Program Penyelenggaraan LLAJ sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan pelayanan transportasi publik.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada Tahun 2025, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut secara umum berada pada kategori **Sangat Tinggi**, dengan **rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 104,67 persen**. Seluruh indikator kinerja utama berhasil memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, bahkan sebagian indikator menunjukkan capaian melampaui target. Hal ini mencerminkan bahwa program dan



kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Selain capaian kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut juga telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun sebelumnya secara berkelanjutan. Tindak lanjut dilakukan melalui perbaikan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja, penyempurnaan Indikator Kinerja Utama, peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan dan pelaporan, serta penguatan pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian kebijakan.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik serta komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut akan terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta penguatan sistem pengendalian dan evaluasi kinerja guna mendukung terwujudnya pelayanan perhubungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi , dan Struktur Organisasi,	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
G. Dukungan SDM, Saran Prasarana dan Anggaran	10
H. Program, kegiatan dan Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.....	12
I. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya	13
J. Sistematika Penyajian	19
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Visi RPJMD	20
B. Misi RPJMD	21
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	22
D. Strategi dan Arah Kebijakan.....	25
E. Perjanjian Kinerja	27
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Akuntabilitas Kinerja.....	30
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	30
2. Analisa Capaian Kinerja Dinas Perhubungan	30
B. Akuntabilitas Keuangan.....	65
 BAB IV. PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS Pergolongan/Pendidikan Tahun 2025	11
Tabel 1.2	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	14
Tabel 2.1	Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dishub	23
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	24
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	25
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025	27
Tabel 2.5	Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025	28
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Strategis.	30
Tabel 3.2	Pengelompokkan Capaian Kinerja	31
Tabel 3.3	Rumus Pengukuran Capaian Kinerja	31
Tabel 3.4	Tujuan dan indikator tujuan.	32
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Terhadap Target 2025	33
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra.....	33
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional.....	33
Tabel 3.8	Data Hasil Survey Traffic Counting	35
Tabel 3.9	VCR Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026... ..	41
Tabel 3.10	Data Total perjalanan angkutan penumpang umum (Bus BTS Trans Banjarbakula, LANGKAR, LAKATAN, dan Damri)	50
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Terhadap Target 2025.....	56
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra.....	56
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional	56
Tabel 3.14	Realisasi Program Penunjang	62
Tabel 3.15	Efisiensi Indikator Volume Capacity Ratio	63
Tabel 3.16	Efisiensi Indikator PersentaseTingkat Keselamatan Transportasi.....	63



Tabel 3.17 Efisiensi Indikator Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	64
Tabel 3.18 Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota.....	65
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.....	66
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku



kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2024 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah;
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran;
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di masa yang akan datang.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

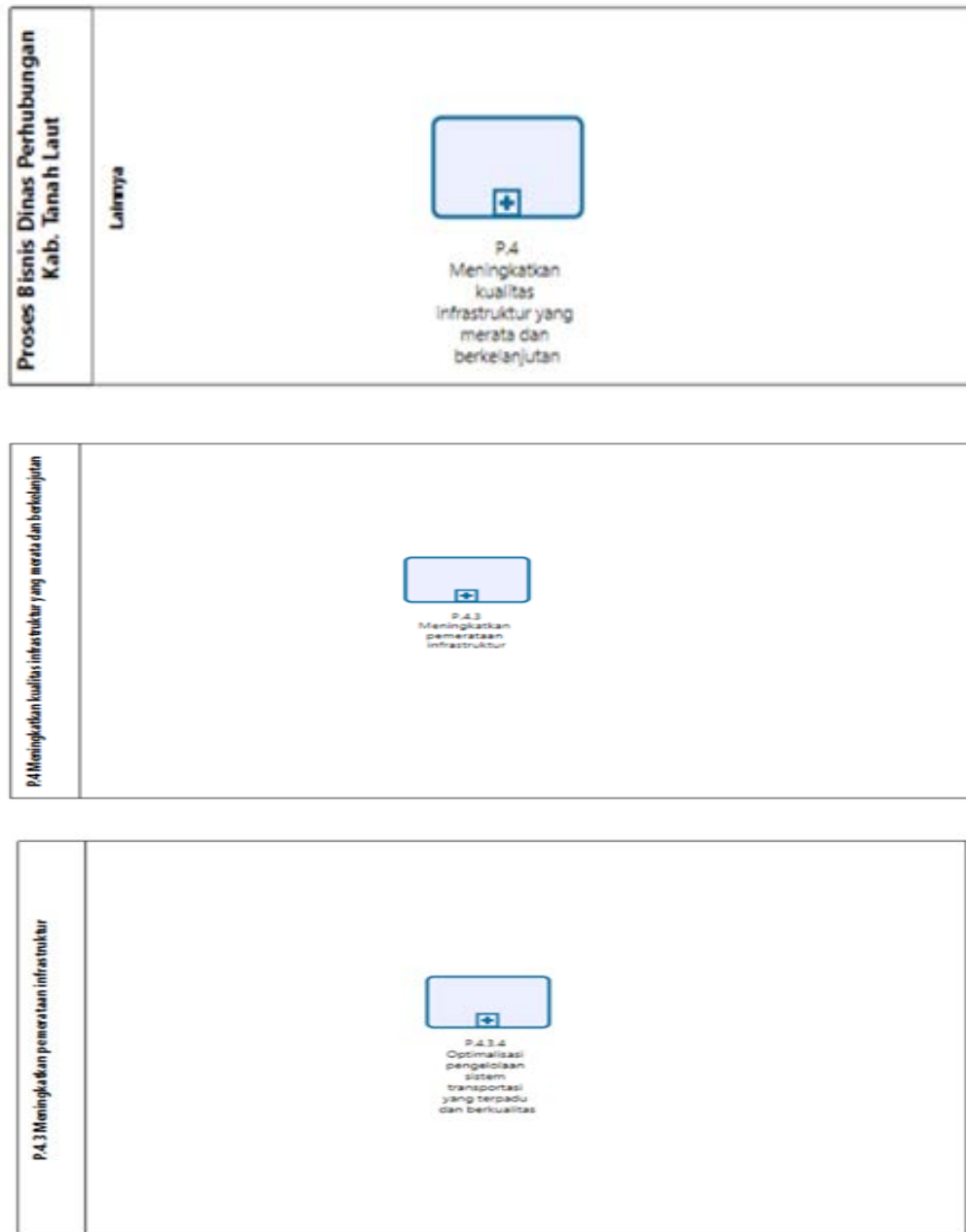
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

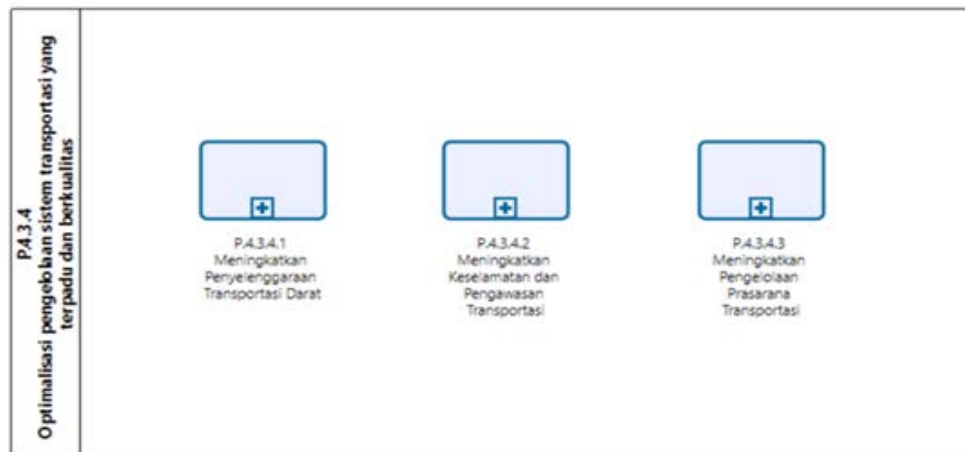


E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dinas Perhubungan telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

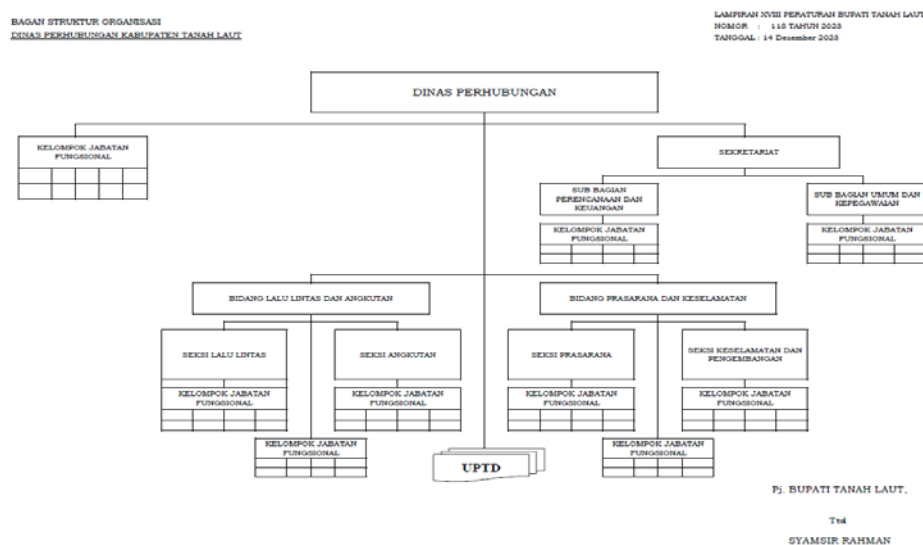




Gambar 1.1 Peta proses bisnis level 0-3 Dinas Perhubungan

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan bidang perhubungan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan bidang perhubungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Perhubungan, yakni:

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - 4) Pelaksana administrasi dinas;
 - 5) Pembinaan UPT Dinas; dan
 - 6) Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
- d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;

- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan Dinas Perhubungan;
 - i. Pengkoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan dan
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



6. Seksi Lalu Lintas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan lalu lintas.
7. Seksi Angkutan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan angkutan.
8. Bidang Prasarana dan Keselamatan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana dan Keselamatan.

Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana dan keselamatan;
 - d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Seksi Prasarana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan prasarana perhubungan.
 10. Seksi Keselamatan dan Pengembangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang keselamatan dan pengembangan perhubungan.
 11. UPT Dinas
 - a. Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
 - b. Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

- c. Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

12. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- e. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- f. jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan Telaahan RTRW dapat disimpulkan keterkaitan antara tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan Isu – Isu Strategis yang ada sebagai berikut :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI		ISU STRATEGIS
Tugas Pokok	Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan Dinas Perhubungan menyelenggarakan Administrasi Keuangan, mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan melaksanakan Hak dan Fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.	Belum optimalnya peran sekretariat dalam memberikan pelayanan untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan
Fungsi	1. Membantu Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan Fungsi, tugas dan wewenangnya serta mewujudkan hubungan kerjasama Pimpinan Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah; 2. Memfasilitasi Kegiatan Rapat – rapat Dinas Perhubungan 3. Menyelenggaraan Administrasi keuangan Dinas Perhubungan 4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dinas Perhubungan 5. Pembinaan administratif yang terdiri dari urusan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;	

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 98 orang yang terdiri dari 40 orang, PPPK Penuh Waktu 3 orang, PPPK Paruh Waktu 45 orang, dan Tenaga 10 Outsourcing dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

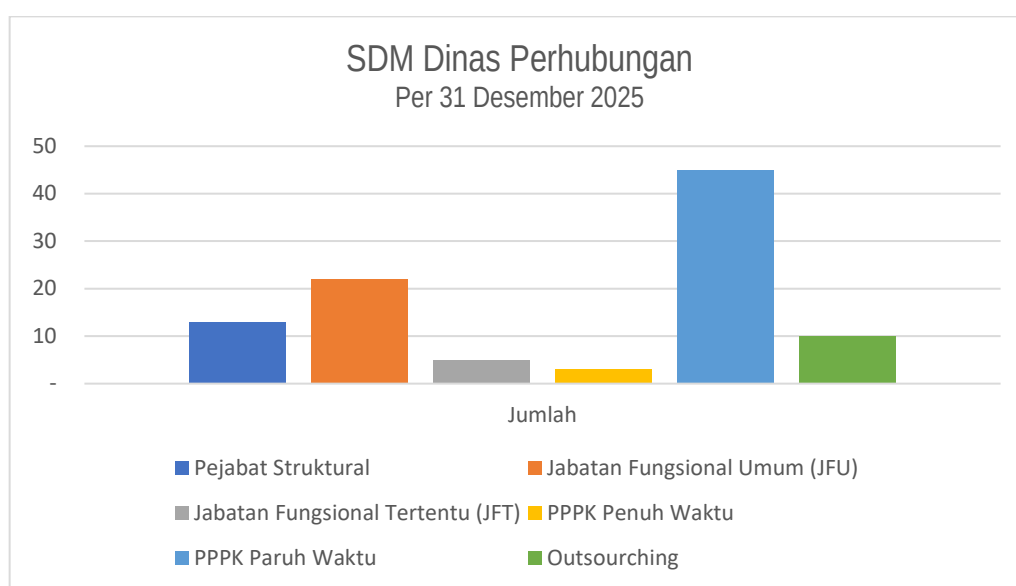
Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
2	30	8	-	58	98	2	29	13	2	49	3	-	98

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Dinas Perhubungan sesuai peta jabatan adalah 98 (sembilan puluh delapan) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 98 orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.3

SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 13 orang Pejabat struktural, 22 orang fungsional umum (JFU), 5 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 3 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 98 pegawai negeri sipil ditambah dengan 45 PPPK Paruh Waktu, dan 10 tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 42 unit Kendaraan Roda 4/3/2, 2 unit Speed boat, 6 unit Gedung kantor, 1 unit Gedung Pengujian Kendaraan Bermoto, 1 unit terminal tipe C, 4 unit Pos UPT Pelabuhan, 1 unit Pos Pengawasan bid. Laut, 2 unit Pos Pengawasan LLAJ, 1 unit Radio Repeater, 62 unit Komputer/Laptop, 1.843 unit Rambu darat Standart, 60 unit Rambu Sungai, 2 unit Rambu Elektronik, 48 unit RPPJ, 96 unit Cermin cembung, 133 unit Delinator, 12 unit Warning light, 6 unit APILL, 93 unit Guardril, 14 unit Halte, 20 unit Pagar Besi Barrie, 128 unit Road Barrier, 91 unit Traficc Cone, 4 lokasi Zoss, 1 lokasi Marka, 1 unit Pellican Crossing, 168 unit APJ 30 Watt, 699 unit APJ 40 Watt, 588 unit APJ 60 Watt, 298 unit APJ 90 Watt, 45 unit APJ 120 Wat, 38 unit APJ Smart System, 1.263 unit APJ Konvensional, 100 unit tiang 7 meter, dan 27 unit lampu sorot.

H. Program, kegiatan dan Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.043.477.785
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.467.582
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.807.007.348
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.126.896
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.187.875.960
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.000.000

No	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		34.526.680.831
	1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	31.166.096.542
	2	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	564.525.107
	3	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	54.308.558
	4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	865.521.748
	5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	193.249.561
	6	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	774.954.826
	7	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	908.024.488
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		438.980.695
	1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.887.000
	2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	409.093.695
	JUMLAH		45.009.139.311

I. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/237/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 77,70 predikat BB kategori Sangat Baik bahwa ada 8 (delapan) hal yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 1.7 Matrik Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
1	Dokumen perencanaan kinerja agar dipublikasikan dan untuk kedepannya agar dilakukan tepat waktu pada Website resmi Dinas Perhubungan dan/atau pada Website PPID Kabupaten Tanah laut.	Dokumen perencanaan kinerja akan dipublikasikan pada Website PPID Kabupaten Tanah laut.	1 kali	Bulan September 2025 (Minggu ke-2)	Sekretaris	Sudah dilaksanakan.	Dokumen perencanaan kinerja sudah dipublikasikan pada Website PPID Kabupaten Tanah laut. Diupload pada tanggal 17 September 2025. <i>Screenshot terlampir.</i>
2	Melakukan perbaikan dokumen IKU dengan menambahkan definisi operasional yang jelas atas indikator kinerjanya dan menambahkan penjelasan yang cukup terhadap rumus pengukuran indikator kinerja.	Akan segera melakukan perbaikan dokumen IKU dengan menambahkan definisi operasional yang jelas atas indikator kinerjanya dan menambahkan penjelasan yang cukup terhadap rumus pengukuran indikator kinerja	1 kali	Bulan September 2025 (Minggu ke-2)	Sekretaris	Sudah dilaksanakan.	Dokumen IKU sudah dilakukan perbaikan dengan menambahkan definisi operasional yang jelas atas indikator kinerjanya dan menambahkan penjelasan yang cukup terhadap rumus pengukuran indikator kinerja. <i>SK IKU tertanggal 17 September 2025 terlampir.</i>

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
3	Melakukan revaluasi kembali apakah penetapan target kinerja Tahun 2025 untuk indikator <i>Volume Capacity Ratio</i> tahun 2025 sebesar < 0,44 telah sesuai dan berdasarkan analisis teknis atau alasan yang logis sehingga target kinerja memang realistis dan dapat dicapai.	Akan melakukan revaluasi kembali terhadap target indikator serta menyiapkan kertas kerja analisis teknis dan alasan logisnya.	1 kali	Bulan September 2025 (Minggu ke-3)	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Sudah dilaksanakan.	Analisis teknis akan menyesuaikan target volume capacity ratio di Kabupaten Tanah Laut.
4	Melakukan perbaikan terhadap target kinerja pada 3 (tiga) buah indikator kinerja periode 2025-2029 agar mencerminkan pencapaian kinerja yang semakin baik (nilai target yang semakin naik/baik dari tahun ke tahun). Indikator yang dimaksud yaitu: Ratio Konektivitas Kabupaten Kota, Persentase Daerah yang Terlayani Transportasi Umum dan <i>Volume Capacity Ratio</i> .	Akan melakukan revaluasi kembali terhadap target indikator : Ratio Konektivitas Kabupaten Kota; Persentase Daerah yang Terlayani Transportasi Umum; <i>Volume Capacity Ratio</i> .	1 kali	Bulan September 2025 (Minggu ke-3)	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Sudah dilaksanakan.	Terhadap indikator masing-masing akan disampaikan sebagai berikut : Indikator ratio konektivitas kabupaten/ kota dalam 5 tahun direncanakan mengalami peningkatan berdasarkan index ratio; Indikator persentase daerah yang terlayani transportasi umum dalam 5 tahun direncanakan mengalami target yang meningkat menyesuaikan dengan ratio konektivitas kabupaten/kota; Indikator volume capacity ratio di Kabupaten Tanah Laut secara rata-rata adalah sebesar 0,24 dengan tingkat

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
							tertinggi adalah 0.7. Perubahan terhadap indikator ini sangat kecil sehingga dalam 5 tahun ratio ini dapat dikatakan tidak terlalu berubah secara signifikan, kecuali ketika nilai suatu ruas jalan sudah melebihi 0,85 maka harus dilakukan penanganan
5	Memberikan arahan tertulis untuk pejabat yang melakukan penilaian kinerja terhadap laporan kinerja pegawai di bawahnya agar memberikan umpan balik (feedback) dengan uraian yang cukup sehingga terlihat adanya gambaran sejauh mana kualitas capaian kinerja, permasalahan/ hambatan yang terjadi dan upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja selanjutnya.	Akan memberikan arahan tertulis untuk pejabat yang melakukan penilaian kinerja terhadap laporan kinerja pegawai di bawahnya agar memberikan umpan balik (feedback)	1 kali	Bulan September 2025 (Minggu ke-1)	Semua Pejabat Eselon II, eselon III, dan Eselon IV	Sudah dilaksanakan.	Terhitung 1 September 2025 pejabat Dishub yang melakukan penilaian kinerja terhadap laporan kinerja pegawai di bawahnya sudah memberikan umpan balik (feedback). <i>Bukti pelaksanaan terlampir</i>

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
6	Kedepan agar menggunakan data pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran (contoh: perubahan Renstra dan Renstra) sehingga perubahan tersebut benar-benar tetap fokus berorientasi hasil, efektif dalam pencapaian tujuan dan efisien dalam penggunaan sumber daya.	Kedepan akan menggunakan data pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran	1 kali	Bulan Nopember 2025 (Minggu ke-4)	Semua PPTK	Sudah dilaksanakan.	Telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2025 saat pergeseran Anggaran Tahun 2026
7	Ke depan agar dipastikan keselarasan sasaran dan indikator kinerja pada dokumen Renstra, IKU, Renja, PK dan Laporan Kinerja. Untuk memastikan keselarasan agar dibuat matriks tabel keselarasan untuk perencanaan Tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya.	Akan dibuat matrik keselarasan sasaran dan indikator kinerja pada dokumen Renstra, IKU, Renja, PK dan Laporan Kinerja	1 kali	Bulan Juli 2025 (Minggu ke-3)	Tim Penyusun RENSTRA, Renja, LKj Dishub	Sudah dilaksanakan pada saat reviu Renja 2026 (tanggal 24 Juli 2025)	Matrik keselarasan sasaran dan indikator kinerja pada dokumen Renstra, IKU, Renja, PK dan Laporan Kinerja terlampir

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
8	Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja pada tingkat nasional, atau dengan pemerintah daerah lain (<i>benchmarking</i>), sehingga kinerja OPD dapat dinilai secara lebih objektif dan terukur.	Berupaya untuk mengumpulkan data capaian kinerja ke Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perhubungan lainnya.	1 kali	Bulan Pebruari 2026 (Minggu ke-2)	Tim Penyusun LKj Dishub	Sudah dilaksanakan. Finalisasi LKj 2025 pada tanggal 09 Pebruari 2026	Data capaian kinerja Kementerian Perhubungan baru dapat tekonfirmasi/ diperoleh pada saat RAKORTEK BANGKDA tahun 2026 sehingga datanya tidak dapat disajikan dalam penyusunan LKj 2025.

J. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Perhubungan Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Perhubunganbekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas PerhubunganKabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Perhubungan berperan strategis dalam mendukung pencapaian Visi RPJMD melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan. Peran tersebut diwujudkan melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan beserta aspek keselamatannya. Dengan tata kelola yang profesional, efektif, dan akuntabel, Dinas Perhubungan berkontribusi dalam mewujudkan konektivitas wilayah kabupaten melalui sistem transportasi yang aman, selamat, tertib,

dan lancar, guna mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut. Dinas Perhubungan menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama
Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 2 “Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan termasuk dalam mendukung tujuan ketiga yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan sasaran yaitu Meningkatnya Pemerataan infrastuktur. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Pemerataan infrastuktur adalah Rasio Konektivitas.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/Kota dan sasaran strategis Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum .

Tabel 2.1 :

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota		Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	0,71	0,71	0,79	0,88	0,88	0,88	0,88
	1.	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity ratio	0,57	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
			▪ Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	100%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
	2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	64%	75%	75%	88%	88%	88%

Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 000.7.2/019/DISHUB/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity ratio	$V/C \text{ ratio} = \frac{\text{Volume (V)}}{\text{Capacity (C)}}$ <i>Keterangan :</i> ▪ Volume (V) = jumlah kendaraan yang melewati suatu titik/ruas jalan pada periode waktu tertentu (biasanya dalam satuan kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang setara/ smp/jam). ▪ Capacity (C) = arus lalu lintas maksimum yang secara teoritis dapat ditampung oleh suatu ruas jalan atau simpang pada kondisi tertentu, tanpa menimbulkan kemacetan berlebihan.
		▪ Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	
		$TKTJ = 100\% - \left(\frac{\text{Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum pada trayek}}{\text{total perjalanan angkutan penumpang umum pada trayek}} \right) \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> ▪ TKTJ = Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan ▪ Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum adalah jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum yaitu : BTS Trans Banjarbakula, Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Angkutan Damri. ▪ Total perjalanan angkutan penumpang umum yaitu total perjalanan angkutan penumpang bus BTS Trans Banjarbakula, Bus Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Bus Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Bus Angkutan Damri.	

2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum
		$\% \text{ Daerah yang terlayani transportasi umum} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}} \times 100\%$ <i>Keterangan :</i> ▪ % Daerah yang terlayani transportasi umum adalah daerah/wilayah yang terlayani angkutan penumpang umum seperti angkutan BTS Trans Banjarbakula, Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Angkutan Damri. ▪ Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten adalah jumlah trayek angkutan penumpang umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut; ▪ Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten adalah kebutuhan jumlah trayek angkutan penumpang umum yang diperlukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota	1. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas 2. Meningkatkan pelayanan angkutan umum	1. Pengembangan infrastruktur dasar	▪ Pengembangan infrastruktur transportasi ▪ Peningkatan konektivitas jaringan jalan ▪ Pengembangan dan integrasi transportasi darat, laut dan sungai.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Pengembangan sistem transportasi publik	▪ Pengembangan sistem transportasi publik yang efektif dan efisien. ▪ Peningkatan kualitas layanan transportasi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat. ▪ Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta melalui pola KPBU.
		3. Pengembangan teknologi transportasi	▪ Pengembangan teknologi transportasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. ▪ Pengembangan sistem informasi transportasi yang akurat dan efektif. ▪ Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dan efektif
		4. Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan	▪ Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. ▪ Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan ▪ Pengembangan sistem transportasi yang berbasis teknologi dan inovatif.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	1	Volume Capacity ratio	0.44	Kepala Dinas Perhubungan
		2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	99,99%	Kepala Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	1	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	55%	Kepala Dinas Perhubungan

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Dinas Perhubungan didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 45.009.139.310,89. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	33.661.159.083,04
		Program pengelolaan pelayaran	409.093.694,72
		JUMLAH	34.070.252.777,76
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	865.521.748,00
		Program pengelolaan pelayaran	29.887.000,00
		JUMLAH	895.408.748,00

Selain program diatas, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan kesekretariatan internal sebesar Rp. 10.043.477.785,13.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,67%.

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 : Indikator Sasaran Strategis

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	1	Volume Capacity ratio	0,44	0,44	100%	Sangat Tinggi
		2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	99,99%	100%	100,01%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	1	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	64%	73%	114%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025						104,67%	Sangat Tinggi

2. Analisa Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Perhubungan telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran,

dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 3 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
Asumsi II (kondisi tidak umum)	Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN

Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota.**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota.

Tabel 3.4
Tujuan dan indikator tujuan

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	Nilai	0,71

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas
- 2) Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas

Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity ratio	Nilai	0,17	0,26	0,53	0,44	0,44	100%
		▪ Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	%	100	100	100	99,99	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									100%

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target akhir renstra	Capaian tahun 2025 terhadap target akhir renstra
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity ratio	Nilai	0,44	0,44	100%	0,44	100%
		▪ Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	%	99,99	100	100,01%	99,99	100,01%

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Banjarmasin	Provinsi	Nasional
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	▪ Volume Capacity ratio	Nilai	0,67	0,56	-
		▪ Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	%	100	100	

a. Volume Capacity ratio

Volume Capacity Ratio (V/C Ratio) adalah perbandingan antara volume lalu lintas aktual yang melewati suatu ruas jalan atau simpang pada periode tertentu dengan kapasitas maksimum jalan atau simpang tersebut yang masih dapat dilayani dengan tingkat kinerja tertentu.

Secara rumus dituliskan:

$$\text{V/C ratio} = \frac{\text{Volume (V)}}{\text{Capacity (C)}}$$

Keterangan :

- **Volume (V)** = jumlah kendaraan yang melewati suatu titik/ruas jalan pada periode waktu tertentu (biasanya dalam satuan kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang setara/ smp/jam).
- **Capacity (C)** = arus lalu lintas maksimum yang secara teoritis dapat ditampung oleh suatu ruas jalan atau simpang pada kondisi tertentu, tanpa menimbulkan kemacetan berlebihan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Lalu Lintas
 - Survei volume lalu lintas (traffic counting).
 - Identifikasi jenis kendaraan (smp/jam).
 - Pencatatan arus lalu lintas pada jam puncak.
2. Penghitungan Kapasitas Jalan
 - Menggunakan pedoman *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI 1997)* atau standar terbaru.
 - Memperhitungkan lebar jalan, jumlah lajur, hambatan samping, dan kondisi lingkungan.
3. Perhitungan dan Analisis V/C Ratio
 - Menghitung rasio volume terhadap kapasitas (V/C).
 - Menentukan tingkat pelayanan (LOS/Level of Service) ruas jalan.
 - Mengidentifikasi titik-titik kemacetan.

Kegiatan survei volume lalu lintas (traffic counting) pada tahun 2025 ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025 dan bulan April 2025 dengan hasil survey sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Data Hasil Survey Traffic Counting

KAPASITAS JALAN PERKOTAAN & LUAR PERKOTAAN KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025								
No	Nama Ruas	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan	Volume Lalu Lintas Tertinggi	V/C ratio	Level Of Service (LOS)	Panjang Jalan	Keterangan
1	JL A.YANI I (LIANG ANGGANG-SAMBANGAN)	2/2 TT	2017,01	1400,5	0,69	C	3,247	JALAN ARTERI
2	JL A.YANI II (SAMBANGAN-SIMPANG BATI-BATI)	2/2 TT	2394	1537,46	0,64	C	3,047	
3	JL A YANI III (SIMPANG BATI-BATI -NUSA INDAH)	2/2 TT	2394	1436	0,6	C	0,73	
4	JL A. YANI IV(NUSA INDAH-TELUK PULANTAN)	2/2 TT	2268	1167,08	0,51	C	5,195	
5	JL A. YANI V(TELUK PULANTAN-GUNUNG RAJA)	2/2 TT	4692,24	1077,73	0,23	B	5,029	
6	JL A. YANI VI (GUNUNG RAJA-KURAU)	2/2 TT	2749,95	1203,49	0,44	B	2	
7	JL A. YANI VII (KURAU-TAMBANG ULANG)	2/2 TT	1711,08	769,82	0,45	C	3,886	
8	JL A. YANI VIII (TAMBANG UALNG-GUNUNG KAYANGAN)	2/2 TT	1711,08	892,39	0,52	C	3,079	
9	JL A. YANI IX (GUNUNG KAYANGAN-PELAIHARI)	2/1 T	3274,2	684,5	0,21	B	2,727	
10	JL A. YANI X (GUNUNG KAYANGAN-BANJARMASIN)	2/1 T	2754	725	0,26	B	2,645	
11	JL A. YANI XI (GUNUNG KAYANGAN-AMBUNGAN)	2/2 TT	1955,52	1183,23	0,61	C	0,783	
12	JL A. YANI XII (AMBUNGAN-BATAS PELAIHARI)	2/2 TT	1588,86	1128,74	0,71	C	3,671	
13	JL A. YANI XIII (BATAS PELAIHARI-SIMPANG ANGSAU)	2/2 TT	1814,4	1125,3	0,62	C	2,724	
14	JL A. YANI XIV (SARANG HALANG-TAMPANG)	2/2 TT	1539,72	1154,1	0,75	C	2,104	
15	JL A. YANI XV (TAMPANG-SUMBER MULYA)	2/2 TT	1539,72	1066,87	0,69	C	3,331	
16	JL A. YANI XVI (SUMBER MULYA-DJILATAN)	2/2 TT	1539,72	943,8	0,61	C	7,267	
17	JL A. YANI XVII (DJILATAN-ALUR)	2/2 TT	1711,08	698,43	0,41	B	13,955	
18	JL A. YANI XVIII (ALUR-MUARA JORONG)	2/2 TT	1625	705,05	0,43	B	7,541	
19	JL A. YANI XIX (MUARA JORONG-ASAM-ASAM)	2/2 TT	2419,96	740,96	0,31	B	10,154	
20	JL A. YANI XX (ASAM-ASAM-RIAM ANDUNGAN)	2/2 TT	1506,96	656,23	0,44	B	9,637	
21	JL A. YANI XXI (RIAM ANDUNGAN-KINTAPURA)	2/2 TT	2226,67	492,29	0,22	B	13,137	

KAPASITAS JALAN PERKOTAAN & LUAR PERKOTAAN KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025								
No	Nama Ruas	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan	Volume Lalu Lintas Tertinggi	V/C ratio	Level Of Service (LOS)	Panjang Jalan	Keterangan
22	JL A. YANI XXII (KINTAPURA-PASIR PUTIH)	2/2 TT	2226,67	534,54	0,24	B	2,75	
23	JL A. YANI XXIII (PASIR PUTIH-AKSES PELABUHAN KINTAP)	2/2 TT	2226,67	540,31	0,24	B	9,609	
24	JL A. YANI XXIV (AKSES PELBUHAN KINTAP-MEKAR SARI)	2/2 TT	2135,71	534,78	0,25	B	6,052	
25	JL A. YANI XXV (MEKAR SARI-TANAH BUMBU)	2/2 TT	2368,8	709,7	0,3	B	4,878	
26	JL KEMAKMURAN I (TUGU ADIPURA-PASAR PARABOLA)	2/2 TT	2803,5	1167,45	0,42	B	0,142	
27	JL KEMAKMURAN II (PASAR PARABOLA-TUGU PKK)	2/2 TT	2551,5	906,34	0,36	B	0,231	
28	JL MUSLIMIN	4/2 TT	2477,38	1298,96	0,52	C	1,58	
29	JL. SARANG HALANG I (TUGU ADIPURA-AMBAWANG)	2/2 TT	1529,22	870,85	0,57	C	1,783	
30	JL SARANG HALANG II (AMBAWANG-SIMPANG SARANG HALANG)	2/2 TT	1612,33	1289,1	0,8	D	0,2	
31	JL SARANG HALANG III (SIMPANG SARANG HALANG-RS BOEJASIN)	2/2 TT	1529,22	1019,8	0,67	C	1,914	
32	JL. AKSES PELABUHAN KINTAP	2/2 TT	2017,01	320,66	0,16	A	7,235	JALAN KOLEKTOR
33	JL H MISTAR COKROKUSUMO I (BANJARBARU-BENTOK DARAT)	2/2 TT	1953,95	983,8	0,5	C	1,843	
34	JL H MISTAR COKROKUSUMO II (BENTOK DARAT-BENTOK KAMPUNG)	2/2 TT	1953,95	762,42	0,39	B	1,684	
35	JL H MISTAR COKROKUSUMO III (BENTOK KAMPUNG-SIMPANG BATI-BATI)	2/2 TT	1999,39	853,17	0,43	B	5,572	
36	JL PANCASILA I (SIMPANG TUGU PKK - SIMPANG PAMAN ADUL)	2/2 T	1374,14	1145,7	0,83	D	0,15	
37	JL PANCASILA II (SIMPANG PAMAN ADUL - SIMPANG PLAYHERE)	2/2 T	1374,14	1065	0,78	D	0,282	
38	JL RAYA TAKISUNG I (SIMPANG AL-FATAH-RANGGANG)	2/2 TT	1711,08	584,83	0,34	B	7,962	

KAPASITAS JALAN PERKOTAAN & LUAR PERKOTAAN KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Nama Ruas	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan	Volume Lalu Lintas Tertinggi	V/C ratio	Level Of Service (LOS)	Panjang Jalan	Keterangan
39	JL. RAYA TAKISUNG II (RANGGANG-BANUA TENGAH)	2/2 TT	2086,56	588,51	0,28	B	5,917	
40	JL. RAYA TAKISUNG III (BANUA TENGAH-GUNUNG MAKMUR)	2/2 TT	2086,56	841,8	0,4	B	1,346	
41	JL. RAYA TAKISUNG IV (GUNUNG MAKMUR-SUMBER MAKMUR)	2/2 TT	1340,64	747,86	0,56	C	3,795	
42	JL. RAYA TAKISUNG V (SUMBER MAKMUR-PANTAI TAKISUNG)	2/2 T	1291,17	319,1	0,25	B	1,657	
43	JL BUMI MAKMUR I (BATAS KAB.BANJAR-KANTOR KEC.BUMI MAKMUR)	2/2 TT	1064,45	214,8	0,2	B	4,05	
44	JL BUMI MAKMUR II (KANTOR KEC.BUMI MAKMUR-LKR KURAU)	2/2 TT	1530,14	181,32	0,12	A	2,963	
45	JL BANYU IRANG	2/2 TT	2040,19	286,86	0,14	A	5,28	
46	JL. KAIT KAIT BARU	2/2 TT	1064,45	174,18	0,16	A	1,83	
47	JL. GUNUNG RAJA	2/2 TT	1241,86	260,16	0,21	B	9,94	
48	JL. TAMBANG ULANG	2/2 TT	1241,86	265,73	0,21	B	5,49	
49	JL. BANUA TENGAH	2/2 TT	1241,86	231,85	0,19	A	8,99	
50	JL PANGERAN ANTASARI	2/2 TT	2038,93	1077,65	0,53	C	0, 349	
51	JL KH NAWAWI	2/2 TT	2017,01	675,2	0,33	B	1,73	
52	JL LKR KURAU	2/2 TT	1587,6	210,45	0,13	A	1,08	
53	JL PADANG LUAS KURAU I (PASAR KURAU-GUNUNG RAJA)	2/2 TT	1587,6	157,28	0,1	A	4,98	
54	JL PADANG LUAS KURAU II (GUNUNG RAJA-DESA MALUKA BAULIN)	2/2 TT	1587,6	211,95	0,13	A	6,02	
55	JL SWADAYA I (DESA MALUKA BAULIN-KAYU ABANG)	2/2 TT	1383,48	348,1	0,25	B	4,748	
56	JL SWADAYA II (KAYU ABANG-SIMPANG KURAU)	2/2 TT	1383,48	358,74	0,26	B	2,944	
57	JL. SAMUDERA	2/2 TT	2404,65	956,85	0,4	B	3,17	

KAPASITAS JALAN PERKOTAAN & LUAR PERKOTAAN KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025								
No	Nama Ruas	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan	Volume Lalu Lintas Tertinggi	V/C ratio	Level Of Service (LOS)	Panjang Jalan	Keterangan
58	JL MATAH	2/2 TT	2431,07	800,2	0,33	B	1,073	
59	JL. ALUR	2/2 TT	1552,32	489,35	0,32	B	8,31	
60	JL. KINTAPURA	2/2 TT	1064,45	358,56	0,34	B	1,68	
61	JL. PT SUN	2/2 TT	1112,83	217,18	0,2	B	1,387	
62	JL. MUARA JORONG	2/2 TT	1241,86	562,1	0,45	C	10,94	
63	JL. BUKIT MULYA	2/2 TT	1298,3	543,65	0,42	B	2,46	
64	JL. ASAM ASAM	2/2 TT	1241,86	827,61	0,67	C	10,87	
65	JL RAYA PANYIPATAN I (PT SUN-KAMPUNG BARU)	2/2 TT	1587,6	857,87	0,54	C	4,42	
66	JL RAYA PANYIPATAN II (KAMPUNG BARU-BANUA TENGAH)	2/2 TT	1587,6	909,01	0,57	C	3,446	
67	JL RAYA PANYIPATAN III (BANUA TENGAH-DESAMSUNGAI RIAM)	2/2 TT	1587,6	794,8	0,5	C	3,173	
68	JL RAYA PANYIPATAN IV (DESA SUNGAI RIAM-TELAGA LANGSAT)	2/2 TT	1340,64	702,11	0,52	C	2,911	
69	JL RAYA PANYIPATAN V (TELAGA LANGSAT-SABUHUR)	2/2 TT	1368,11	666,33	0,49	C	3,516	
70	JL KURINGKIT I (SABUHUR-BUMI ASIH)	2/2 TT	1414,22	655,81	0,46	C	3,539	
71	JL KURINGKIT II (BUMI ASIH-DESA KURINGKIT)	2/2 TT	1530,14	614,52	0,4	B	1,188	
72	JL BATU	2/2 TT	1383,48	621,6	0,45	C	3,454	
73	JL KANDANGAN	2/2 TT	1383,48	622,07	0,45	C	9,811	
74	JL PARIWISATA	2/2 TT	1383,48	714,98	0,52	C	1,922	
75	JL. ATU ATU	2/2 TT	1382,98	567,2	0,41	B	2,236	JALAN LOKAL
76	JL H. BOEJASIN I (TUGU ADIPURA-AL MANAR)	2/2 TT	2686,65	989,67	0,37	B	0, 403	
77	JL. H. BOEJASIN II (AL MANAR-PENGADILAN AGAMA)	2/2 TT	2870,78	1181,2	0,41	B	0, 525	
78	JL. H. BOEJASIN III (PENGADILAN AGAMA-SIMPANG TUNTUNG PANDANG)	2/2 T	1520,21	1075,86	0,71	C	0, 223	

KAPASITAS JALAN PERKOTAAN & LUAR PERKOTAAN KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025

No	Nama Ruas	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan	Volume Lalu Lintas Tertinggi	V/C ratio	Level Of Service (LOS)	Panjang Jalan	Keterangan
79	Jl. BALIREJO	2/2 TT	2148,55	1532,85	0,71	C	0, 509	
80	Jl. PASAR HEWAN	2/2 TT	2108,23	704,36	0,33	B	0, 264	
81	Jl. TELUK RAUNG	2/2 TT	887,04	34,31	0,04	A	2,19	
82	Jl TABANIO	2/2 TT	2017,01	214,11	0,11	A	12,45	
83	Jl BAJUIN	2/2 TT	1382,98	374,91	0,27	B	9,78	
84	Jl KH MANSYUR	2/2 TT	1340,64	1052,3	0,78	D	0,814	
85	Jl. GAGAS PERMAI	2/2 TT	1159,2	406	0,35	B	0,483	
86	Jl. DATU DAIM I (BAJUIN PLAZA-PLN)	2/2 TT	907,2	767	0,85	E	0,183	
87	Jl. DATU DAIM II (PLN-SIMPANG GEMBIRA)	2/2 TT	1871,35	726,1	0,39	B	0,427	
88	Jl. DATU DAIM III (SIMPANG GEMBIRA-LANNGAR AN NOOR)	2/2 TT	1966,1	715,35	0,36	B	0,1	
89	Jl. PERINTIS	2/2 TT	1298,3	456,71	0,35	B	0,323	
90	Jl. VETERAN	2/2 TT	2343,6	1290,04	0,55	C	0,084	
91	Jl. TAQWA	2/2 TT	2038,93	424,55	0,21	B	0,232	
92	Jl. KERAMAT	2/2 TT	1622,88	402,25	0,25	B	0,136	
93	Jl. PUSARA	2/2 TT	1622,88	418,05	0,26	B	0,349	
94	Jl. ABADI	2/2 TT	1622,88	323,46	0,2	B	0,219	
95	Jl. KS TUBUN	2/2 TT	1298,3	466,21	0,36	B	0,347	
96	Jl. AL MANAR	2/2 TT	947,52	273,94	0,29	B	0,604	
97	Jl. PURNAWIRAWAN	2/2 TT	1344,67	288,45	0,21	B	0,191	
98	Jl. MANUNGAL	2/2 TT	1112,83	98,05	0,09	A	0,785	
99	Jl DATU INSAD	2/2 TT	2968,81	1324	0,45	C	0,474	
100	Jl BASUKI RAHMAT	2/2 TT	1065,96	523,98	0,49	C	1,42	
101	Jl NOORSEHAT	2/2 TT	1973,16	478,36	0,24	B	0,337	

KAPASITAS JALAN PERKOTAAN & LUAR PERKOTAAN KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025								
No	Nama Ruas	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan	Volume Lalu Lintas Tertinggi	V/C ratio	Level Of Service (LOS)	Panjang Jalan	Keterangan
102	JL NIAGA	2/2 TT	1298,3	330,07	0,25	B	0,368	
103	JL DHARMA	2/2 TT	1298,3	447,41	0,34	B	0,153	
104	JL PUSAKA	2/2 TT	1065,96	400,32	0,38	B	0,428	
105	JL KARYA	2/2 TT	2017,01	242,91	0,12	A	0,131	
106	JL. KOLONEL SOEPIRMAN	2/2 TT	1137,02	712,1	0,63	C	1,248	
107	JL. GEMBIRA I	2/2 TT	1973,16	674,5	0,34	B	0,129	
108	JL. GEMBIRA II	2/2 TT	1973,16	541,15	0,27	B	0,231	
109	JL PEMBANGUNAN	2/2 TT	2017,01	348,7	0,17	A	0,32	
110	JL A. SYAIRANI I (SIMPANG TUNTUNG PANDANG-SMA PGRI)	2/2 TT	2472,12	1576,57	0,64	C	0,809	
111	JL A. SYAIRANI II (SMA PGRI-SIMPANG SARANG HALANG)	2/2 TT	2472,12	1574,58	0,64	C	1,302	
112	JL AMBAWANG	2/2 TT	1929,31	534,76	0,28	B	2,709	

Sumber data : “Hasil Survey Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2025”

Berdasarkan tabel tersebut diatas hasil survey yang dilakukan diperoleh rata-rata vc ratio jalan di Kabupaten Tanah Laut adalah **0,40** dengan Tingkat pelayanan / level of service **B**.

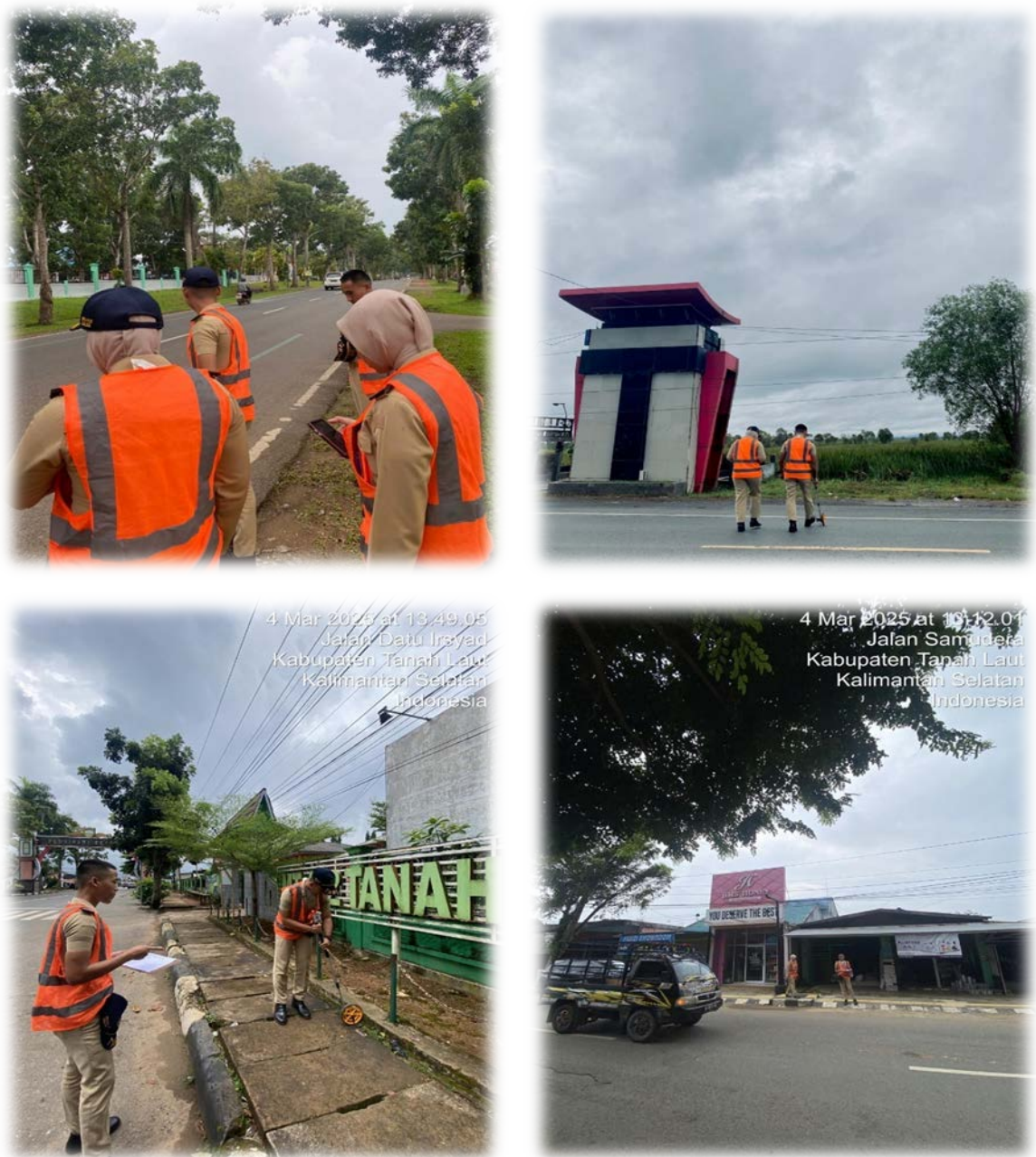
Tabel 3.9 : VCR Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

V/C RATIO DI RUAS JALAN A.YANI (DEPAN TERMINAL TIPE C H. SOEMARSONO PA) DAN RUAS JALAN A.YANI (KELURAHAN SARANG HALANG) PADA PERIODE HARI RAYA NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026												
No	Nama Ruas	Tipe Jalan	Kapasitas Jalan	Hari/ Tanggal	Kendaraan		Total 2 Arah	Volume Lalu Lintas Tertinggi (SMP/Jam)	V/C ratio	Level Of Service (LOS)	Jam Puncak Tertinggi	Kondisi Cuaca
					Masuk (07.00 - 18.00)	Keluar (07.00 - 18.00)	(Kendaraan)					
1	JL A.YANI (DEPAN TERMINAL TIPE C H. SOEMARSONO PA)	2/2 TT	2.060	Kamis, 25 Des 2025	6.853	8.051	14.904	1.046	0,51	C	11.30 - 12.30	Cerah
2				Jumat, 26 Des 2025	6.543	8.567	15.110	1.184	0,57	C	17.00 - 18.00	Cerah Berawan
3				Rabu, 31 Des 2025	9.272	6.278	15.550	1.294	0,63	C	16.30 - 17.30	Berawan
4				Kamis, 1 Jan 2026	6.802	6.710	13.512	1.178	0,57	C	10.30 - 11.30	Hujan
5	JL A. YANI (KELURAHAN SARANG HALANG)	2/2 TT	2.170	Kamis, 25 Des 2025	5.468	5.090	10.558	670	0,31	B	15.00 - 16.00	Cerah Berawan
6				Jumat, 26 Des 2025	7.807	4.528	12.335	1.034	0,48	C	14.15 - 15.15	Cerah Berawan
7				Rabu, 31 Des 2025	5.763	5.129	10.892	731	0,34	B	08.00 - 09.00	Hujan
8				Kamis, 1 Jan 2026	4.922	4.185	9.107	682	0,31	B	17.00 - 18.00	Hujan

Sumber data : “Hasil Survey Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Tahun 2025”

Berdasarkan tabel tersebut diatas hasil survey yang dilakukan pada periode hari raya natal 2025 dan tahun baru 2026 diperoleh rata-rata vc ratio jalan di Kabupaten Tanah Laut adalah **0,44** dengan Tingkat pelayanan / level of service B

Capaian indikator kinerja volume capacity ratio, dari target rasio 0,44 pada tahun 2025, tercapai 100% yaitu dengan realisasi nilai VC Rasio 0,44.

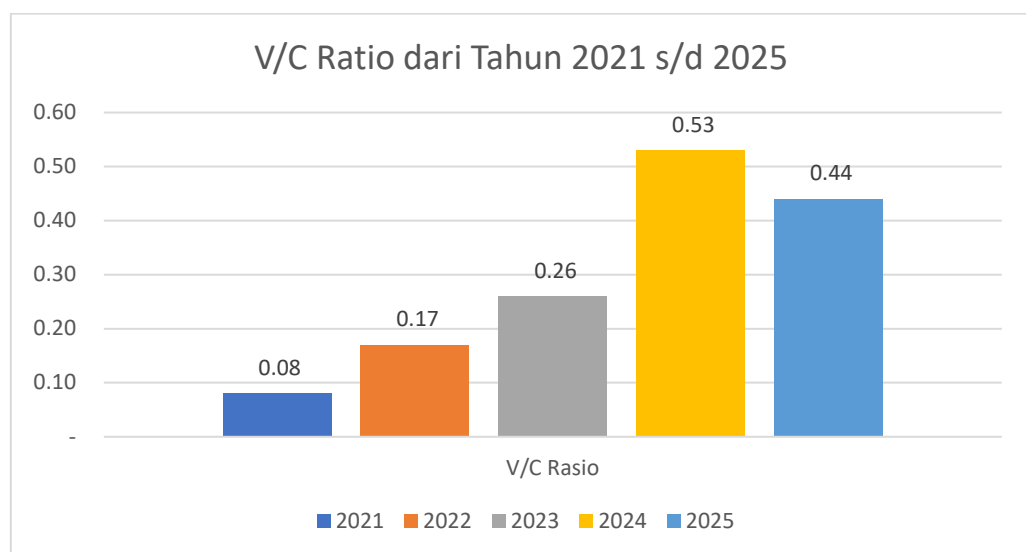


Gambar 3.1 : Kegiatan Survey Volume Lalu Lintas (Traffic Counting) pada bulan Maret dan April 2025



Gambar 3.2 : Kegiatan Survey Volume Lalu Lintas (Traffic Counting) periode hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada ruas jalan A. Yani (Depan Terminal Tipe C H. Soemarsono PA) dan ruas jalan A.Yani (kelurahan Sarang Halang)

Grafik 3.3
Volume Capacity ratio Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Hasil evaluasi capaian kinerja indikator *Volume to Capacity Ratio (V/C Ratio)* selama periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada tingkat pemanfaatan kapasitas jaringan jalan di Kabupaten Tanah Laut. Pada Tahun 2021, nilai V/C Ratio tercatat sebesar **0,08**, kemudian meningkat pada Tahun 2022 menjadi **0,17**, dan kembali naik pada Tahun 2023 menjadi **0,26**. Kondisi tersebut menggambarkan peningkatan aktivitas pergerakan lalu lintas seiring dengan bertambahnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Pada Tahun 2024, nilai V/C Ratio meningkat cukup tajam menjadi 0,53, yang mengindikasikan volume lalu lintas mulai mendekati kapasitas jalan. Meskipun demikian, berdasarkan klasifikasi tingkat pelayanan jalan, nilai tersebut masih berada dalam kategori arus lalu lintas stabil dan belum jenuh. Selanjutnya, pada Tahun 2025 nilai V/C Ratio mengalami penurunan menjadi 0,44, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja lalu lintas. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh upaya pengelolaan lalu lintas, peningkatan kapasitas prasarana, serta pengaturan pergerakan kendaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja V/C Ratio selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja jaringan jalan di Kabupaten Tanah Laut masih berada dalam kondisi stabil dan tidak jenuh, namun memerlukan perhatian berkelanjutan guna mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas pada tahun-tahun mendatang.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi kinerja indikator *Volume to Capacity Ratio (V/C Ratio)* sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang selaras dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut. Target jangka menengah indikator V/C Ratio dalam Renstra ditetapkan berada pada rentang 0,21 sampai dengan 0,44.

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai V/C Ratio pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,44, yang berarti telah mencapai batas atas target jangka menengah yang ditetapkan dan masih berada dalam kategori arus lalu lintas stabil dan tidak jenuh.

Dengan demikian, status capaian kinerja indikator V/C Ratio sampai dengan Tahun 2025 dinyatakan *Target Tercapai*.

Dibandingkan dengan kondisi awal periode perencanaan, realisasi kinerja hingga Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan kapasitas jaringan jalan yang terkelola dengan baik. Capaian ini menjadi dasar dalam perumusan strategi pengendalian lalu lintas dan peningkatan kinerja transportasi pada periode perencanaan selanjutnya.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Realisasi kinerja indikator Volume to Capacity Ratio (V/C Ratio) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,44. Capaian tersebut dibandingkan dengan beberapa wilayah lain menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Nilai V/C Ratio Kota Banjarmasin tercatat sebesar 0,67, sementara rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,56.

Dibandingkan dengan Kota Banjarmasin dan capaian tingkat Provinsi, nilai V/C Ratio Kabupaten Tanah Laut berada pada tingkat yang lebih rendah, yang mengindikasikan kondisi arus lalu lintas yang lebih stabil dan tidak jenuh. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lalu lintas dan pemanfaatan kapasitas jaringan jalan di Kabupaten Tanah Laut relatif lebih terkendali dibandingkan wilayah perkotaan dan rata-rata provinsi.

Adapun untuk perbandingan pada tingkat nasional, data pembanding yang relevan dan sejenis belum tersedia secara spesifik untuk indikator V/C Ratio pada tahun pelaporan, sehingga perbandingan kinerja secara nasional belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, capaian Kabupaten Tanah Laut yang berada di bawah nilai provinsi dan kota besar dapat dijadikan indikasi bahwa kinerja lalu lintas daerah masih berada pada kondisi yang baik dan sesuai dengan target jangka menengah Organisasi.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan “Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas”, Dinas Perhubungan melaksanakan Peningkatan kapasitas jalan.

- Peningkatan prasarana penunjang jalan

Peningkatan prasarana penunjang jalan dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, pemeliharaan, dan pengadaan alat perlengkapan jalan secara terintegrasi. Pada tahap perencanaan, telah dilaksanakan perencanaan kebutuhan alat perlengkapan jalan sebanyak 490 unit yang didasarkan pada hasil survei kondisi lapangan, tingkat kerawanan kecelakaan, volume lalu lintas, serta usulan dari masyarakat dan perangkat daerah terkait. Perencanaan ini mencakup identifikasi jenis, jumlah, dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan agar penempatannya tepat sasaran dan efektif dalam mendukung keselamatan serta ketertiban lalu lintas.

Selanjutnya, untuk menjaga fungsi dan kualitas prasarana yang telah terpasang, dilaksanakan pemeliharaan alat perlengkapan jalan sebanyak 490 unit. Kegiatan pemeliharaan meliputi perbaikan, penggantian, dan pengecatan ulang perlengkapan jalan yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas akibat faktor cuaca dan intensitas penggunaan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh perlengkapan jalan tetap dalam kondisi layak, terlihat jelas, dan dapat berfungsi secara optimal bagi pengguna jalan.

Selain itu, dilaksanakan pula pengadaan alat perlengkapan jalan sebanyak 490 unit sesuai standar teknis yang berlaku. Pengadaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan jalan baru maupun menggantikan perlengkapan yang sudah tidak layak pakai. Dengan pengadaan alat perlengkapan jalan yang memenuhi standar, diharapkan kualitas prasarana penunjang jalan semakin meningkat serta mampu mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.



Gambar 3.4 : Kegiatan Pemasangan tiang APJ (Alat Penerangan Jalan)

- Penataan lalu lintas jaringan jalan

Dalam rangka mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan penataan lalu lintas pada jaringan jalan melalui evaluasi kebutuhan pengaturan, pemasangan dan penyesuaian rambu, marka, serta perangkat pengendali lalu lintas lainnya. Penataan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting dan dinamika arus kendaraan pada ruas-ruas prioritas.

Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan lalu lintas dilaksanakan secara berkala melalui monitoring lapangan dan evaluasi dampak kebijakan terhadap tingkat pelayanan jalan. Selain itu, dilakukan survei manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) untuk memperoleh data volume, kecepatan, dan pola pergerakan kendaraan sebagai dasar perumusan rekomendasi teknis.

Sebagai upaya peningkatan keselamatan, Dinas Perhubungan juga melaksanakan audit keselamatan jalan guna mengidentifikasi potensi risiko kecelakaan serta memberikan rekomendasi perbaikan teknis dan operasional pada lokasi rawan kecelakaan (blackspot), sehingga tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

- Penataan parkir

Penataan parkir di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas”. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang milik jalan serta mengurangi hambatan samping yang berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan.

Pelaksanaan penataan parkir dilakukan melalui penetapan dan penegasan lokasi parkir pada kawasan pusat aktivitas masyarakat, pemasangan dan pemeliharaan rambu serta marka parkir, pembinaan dan pengawasan juru parkir, serta penertiban parkir tidak sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi dan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas pengendalian parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hasil evaluasi, penataan parkir memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketertiban lalu lintas, pengurangan potensi kemacetan pada titik-titik rawan, serta optimalisasi penerimaan retribusi parkir sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ke depan, penataan parkir akan terus ditingkatkan melalui penguatan pengawasan dan penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan dan perkembangan kawasan.

- Patroli parkir, pembinaan terhadap juru parkir atau pengelola parkir liar, penyediaan juru parkir pada lokasi parkir

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan patroli parkir secara rutin pada titik rawan pelanggaran guna menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, dilakukan pembinaan persuasif kepada juru parkir dan pengelola parkir liar agar tertib administrasi, menggunakan atribut resmi, serta mematuhi ketentuan tarif dan retribusi daerah.

Penempatan juru parkir resmi pada lokasi yang telah ditetapkan juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, ketertiban parkir, dan optimalisasi PAD sektor perparkiran. Penetapan lokasi parkir ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 100.3.3.2/956-KUM/2025. Lokasi parkir di tepi jalan umum ada 15 lokasi sedangkan untuk pelayanan parkir ditempat khusus parkir ada 24 lokasi parkir.



Gambar 3.5 : Kegiatan Monitoring/pengawasan parkir

b. Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi

Tingkat Keselamatan Transportasi adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan sejauh mana sistem transportasi mampu meminimalkan risiko kecelakaan, korban jiwa, dan kerugian material, serta memberikan perlindungan terhadap pengguna transportasi, operator, dan masyarakat.

Secara rumus dituliskan :

$$TKTJ = 100\% - \left(\frac{\text{Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum pada trayek}}{\text{total perjalanan angkutan penumpang umum pada trayek}} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- **TKTJ** = Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan
- **Jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum** adalah jumlah kecelakaan angkutan penumpang umum yaitu : BTS Trans Banjarbakula, Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Angkutan Damri.

- **Total perjalanan angkutan penumpang umum** yaitu total perjalanan angkutan penumpang bus BTS Trans Banjarbakula, Bus Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Bus Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Bus Angkutan Damri.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi Armada dan Trayek
 - Menghitung jumlah armada angkutan penumpang umum yang beroperasi;
 - Data jumlah trayek aktif di Kabupaten Tanah Laut
2. Mengumpulkan data keberangkatan angkutan penumpang dan jumlah penumpangnya;
3. Mengumpulkan data kecelakaan angkutan penumpang umum

Tabel 3.10 : Data Total perjalanan angkutan penumpang umum (Bus BTS Trans Banjarbakula, LANGKAR, LAKATAN, dan Damri)

No.	Angkutan Penumpang Umum	Jumlah Perjalanan/ Keberangkatan
1.	Bus LAKATAN	2.920 kali perjalanan
2	Bus LANGKAR	1.452 kali perjalanan
3	Bus BTS Trans Banjarbakula	12.104 kali perjalanan
4	Bus Damri	2.190 kali perjalanan
Total		18.666 kali perjalanan

$$\begin{aligned} \%Tingkat\ Keselamatan\ Transportasi &= 100\% - \left(\frac{0}{18.666} \right) \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dari keseluruhan total perjalanan angkutan penumpang umum 18.666 kali perjalanan dari bulan Januari s/d September 2025 tidak terdapat kejadian kecelakaan (**zero accident**). Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi telah tercapai 100%.



Gambar 3.6 : Layanan Angkutan BTS Trans Banjarbakula



Gambar 3.7 : Layanan Angkutan DAMRI



Gambar 3.8 : Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN)



Gambar 3.9 : Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR)

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada indikator Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi angkutan umum di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 dan 2025 tercapai 100% artinya pada tahun tersebut tidak ada kejadian kecelakaan angkutan umum (**ZERO ACCIDENT**) di Kabupaten Tanah Laut.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi kinerja indikator Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Angkutan Umum sampai dengan tahun berjalan telah mencapai 100% dan sejalan dengan target akhir RENSTRA sebesar 99,99%.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Capaian indikator Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Angkutan Umum pada tahun 2025 mencapai 100% (zero accident), yang ditunjukkan dengan tidak adanya kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di Kabupaten Tanah Laut serta tidak ditemukannya kejadian kecelakaan pada layanan angkutan Buy The Service (BTS) Banjarbakula yang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala (Marabahan).

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan “Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas”, Dinas Perhubungan melaksanakan **Peningkatan kualitas kendaraan bermotor.**

- Peningkatan kualitas prasarana pengujian kendaraan bermotor

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keandalan hasil uji kendaraan bermotor, pemeliharaan peralatan pengujian dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Pada Tahun 2025, kegiatan pemeliharaan peralatan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025, dan selanjutnya dilakukan kalibrasi oleh

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XV guna memastikan akurasi alat uji serta kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku.

Kegiatan pemeliharaan meliputi :

- Pemastian fungsi kerja alat
- Pemerbaiki dan pemeliharaan
- Proses standarisasi alat uji (kalibrasi

Adapun peralatan uji yang telah dilakukan pemeliharaan/perawatan dan lulus kalibrasi ada 11 unit yaitu : Alat Emisi gas buang bensin, Alat Emisi gas buang solar, Alat uji lampu robotik, Timbangan digital portable, Alat uji kegelapan kaca, Alat uji suara / sound level meter, Alat uji kincup roda depan, Alat uji rem statis, Alat uji speedo meter, Axle play join detektor (alat bantu periksa Lorong uji) dan Alat emisi gas buang bensin.

▪ Peningkatan standar uji kelayakan bermotor

Untuk meningkatkan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan melaksanakan peningkatan standar uji kelayakan melalui penerapan SOP pengujian sesuai ketentuan teknis nasional, kalibrasi dan verifikasi berkala seluruh alat uji, pemenuhan kompetensi serta sertifikasi petugas penguji, serta pengendalian mutu melalui monitoring dan evaluasi hasil uji.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelayanan, hasil pengujian diterbitkan dalam bentuk Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) yang terintegrasi dengan sistem nasional sesuai kebijakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penerapan BLUE memastikan keabsahan data uji, meminimalisir potensi pemalsuan, serta mendukung tertib administrasi dan pengawasan kendaraan bermotor secara digital.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor (uji KIR) secara rutin dan tertib serta penerbitan bukti lulus uji sebagai upaya menjamin kelaikan teknis kendaraan;
2. Pengawasan dan pembinaan angkutan umum untuk memastikan pemenuhan standar keselamatan operasional;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, khususnya pada titik rawan kecelakaan dan kemacetan di wilayah Kabupaten Tanah Laut;

4. Koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan Kepolisian dan instansi terkait dalam pengawasan, pengendalian, serta penanganan lalu lintas;
5. Ketersediaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas, seperti rambu, marka jalan, dan fasilitas keselamatan lainnya;
6. Meningkatnya kepatuhan pengguna jalan terhadap ketentuan berlalu lintas sebagai dampak pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Keterbatasan sarana prasarana dan kondisi jaringan jalan yang belum seluruhnya memenuhi standar keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
2. Masih adanya perilaku pengguna jalan yang belum tertib, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan lalu lintas.
3. Keterbatasan sumber daya dan koordinasi lintas sektor pada kondisi tertentu, terutama dalam pengawasan dan penanganan lalu lintas di lapangan.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Optimalisasi penyediaan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan secara bertahap pada ruas dan lokasi rawan kecelakaan guna mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
2. Penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, melalui peningkatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas serta sinergi pelaksanaan pengawasan dan penegakan ketentuan bersama instansi terkait.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya perhubungan, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung manajemen lalu lintas yang efektif dan berkelanjutan.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum

Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	45	55	55	64	73	114%
Rata-Rata Capaian Kinerja 2025									114%

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	%	64	73	114%	82,8	99,49%

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Kab. Tanah Laut	Kabupaten/Kota Lain			Provinsi	Nasional
			Kota Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Kab. Banjar		
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	73%	100%	100%	30%	100%	-

Persentase daerah yang terlayani transportasi umum

Daerah yang terlayani transportasi umum adalah wilayah yang memiliki akses operasional angkutan umum melalui jaringan trayek, fasilitas simpul, dan layanan

yang teratur, sehingga memungkinkan masyarakat menjangkau lokasi asal maupun tujuan perjalanan dengan mudah, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Secara rumus dituliskan :

$$\% \text{ Daerah yang terlayani transportasi umum} = \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada Kabupaten}}{\text{Jumlah Kebutuhan Trayek Pada Kabupaten}} \times 100\%$$

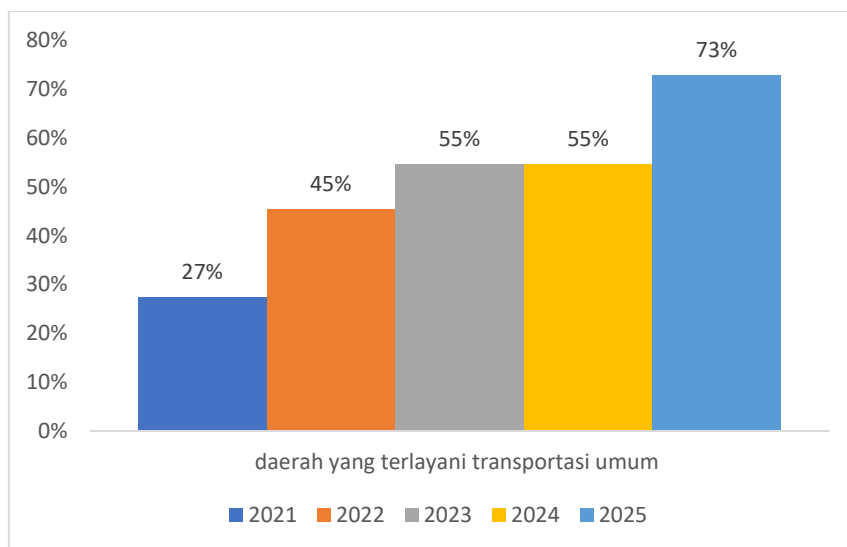
Keterangan :

- **% Daerah yang terlayani transportasi umum** adalah daerah/wilayah yang terlayani angkutan penumpang umum seperti angkutan BTS Trans Banjarbakula, Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), dan Angkutan Damri.
- **Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten** adalah jumlah trayek angkutan penumpang umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- **Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten** adalah kebutuhan jumlah trayek angkutan penumpang umum yang diperlukan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

$$\begin{aligned} \% \text{ Daerah yang terlayani transportasi umum} &= \frac{8 \text{ Trayek}}{11 \text{ Trayek}} \times 100\% \\ &= 73\% \end{aligned}$$

Grafik 3.10

Persentase daerah yang terlayani transportasi umum Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum” pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. Indikator Kinerja Persentase daerah yang terlayani transportasi umum mencapai 73% atau 114% dari target 64%, serta menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2024 sebesar 55%.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator “persentase daerah yang terlayani transportasi umum” pada tahun 2025 tercatat mencapai 73%, dengan tingkat capaian 114% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 64%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 82,8%, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 99,49% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 1,17 poin per tahun, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Berdasarkan indikator kinerja **Persentase daerah yang terlayani transportasi umum**, capaian kinerja Kabupaten Tanah Laut pada tahun berjalan tercatat sebesar **73%**. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan angkutan umum telah menjangkau sebagian besar wilayah kabupaten, namun belum sepenuhnya merata.

Jika dibandingkan dengan **Kabupaten/Kota lain**, capaian Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawah **Kota Banjarmasin** dan **Kota Banjarbaru** yang masing-masing telah mencapai **100%** pelayanan wilayah. Namun demikian, capaian Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi dibandingkan **Kabupaten Banjar** yang baru mencapai **30%**, sehingga secara regional kinerja Kabupaten Tanah Laut berada pada posisi menengah.

Pada tingkat Provinsi, capaian indikator tercatat sebesar 100%, sehingga capaian Kabupaten Tanah Laut masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan

kinerja provinsi. Sementara itu, pada tingkat Nasional, data pembandingan tidak tersedia sehingga perbandingan secara nasional belum dapat dilakukan.

Secara umum, capaian Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, namun masih diperlukan upaya lanjutan untuk memperluas cakupan layanan angkutan umum, khususnya pada wilayah dengan aksesibilitas rendah, agar dapat meningkatkan kesetaraan pelayanan antarwilayah dan mendukung pencapaian target provinsi.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perhubungan “Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum”, Dinas Perhubungan melaksanakan Peningkatan perluasan jaringan transportasi dan Peningkatan kualitas sarana perhubungan.

a. Peningkatan perluasan jaringan transportasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan peningkatan dan perluasan jaringan transportasi melalui penyediaan angkutan umum dan angkutan pelajar pada wilayah yang belum terlayani secara optimal. Kegiatan ini didukung melalui sosialisasi kepada masyarakat serta penataan jumlah trayek dan armada sesuai kebutuhan pelayanan.

Pada Tahun 2025, armada angkutan LAKATAN bertambah 1 (satu) unit. Dengan penambahan tersebut, total armada yang disiapkan Dinas Perhubungan berjumlah 9 (sembilan) unit, terdiri atas 6 (enam) unit angkutan LAKATAN dan 3 (tiga) unit angkutan LANGKAR, guna meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan, aksesibilitas masyarakat, dan pemerataan layanan transportasi secara efektif dan berkelanjutan.

Gambar 3.11 : Penambahan Armada bus LAKATAN

b. Peningkatan kualitas sarana perhubungan

▪ Peningkatan kualitas terminal

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pada Terminal Tipe C Somarsono PA. Kegiatan ini difokuskan pada penataan area parkir dan ruang tunggu penumpang, perbaikan fasilitas pendukung, serta peningkatan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan terminal. Pada tahun 2025 ini dilakukan penambahan fasilitas utama/pendukung terminal berupa pengadaan Musolla, WC Umum, dan Penataan Parkir di terminal.

Upaya peningkatan kualitas juga mencakup penataan operasional keberangkatan dan kedatangan angkutan umum, pengaturan sirkulasi kendaraan di dalam kawasan terminal, serta penguatan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat penumpang. Langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan terminal yang tertib, representatif, dan mampu mendukung kelancaran pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah Pelaihari dan sekitarnya.

Melalui peningkatan ini, diharapkan fungsi terminal sebagai simpul transportasi darat dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum, serta mendukung kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.



Gambar 3.12 : Pembangunan Musolla dan WC umum di terminal

- Rehabilitasi halte

Pada tahun 2025 ini ada 3 unit halte yang direhabilitasi yaitu : Halte di SMP Negeri 2 Pelaihari, SDN Angasu 4 dan Halte di Simpang Bumi Jaya.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Meningkatnya persentase daerah yang terlayani transportasi umum melalui perluasan jaringan dan penataan rute angkutan.
2. Tersedianya layanan angkutan umum bersubsidi/perintis yang mendukung keterjangkauan wilayah pelayanan.
3. Terjalinnnya koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat dan operator angkutan dalam penyelenggaraan layanan transportasi umum.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Keterbatasan armada dan dukungan anggaran menyebabkan perluasan layanan angkutan umum belum menjangkau seluruh wilayah.
2. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan layanan.
3. Kondisi geografis serta sebaran permukiman yang tidak merata menyulitkan peningkatan persentase daerah terlayani

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Optimalisasi dan penataan rute angkutan umum pada wilayah prioritas serta pengusulan penambahan armada melalui dukungan anggaran dan program pemerintah pusat.
2. Peningkatan daya tarik layanan angkutan umum melalui perbaikan kualitas sarana, penyesuaian jadwal, dan integrasi layanan.
3. Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, operator angkutan, dan pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan pelayanan secara bertahap.

Dalam mencapai sasaran *Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas* dan sasaran *Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum* di dukung oleh Sumber daya manusia sebanyak 98 orang yang terdiri dari PNS 40 orang, PPPK Penuh Waktu 3 orang, PPPK Paruh Waktu 45 orang, dan Tenaga 10 Outsourcing serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 34.965.661.525,76 dan terealisasi Rp. 31.750.141.323,00 atau sebesar 90,80%

Tabel 3.14
Realisasi Program Penunjang

No.	Sasaran strategis	Program	Pagu	Realisasi
1	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	33.661.159.083,04	30.668.444.023,00
		Program pengelolaan pelayaran	409.093.694,72	400.363.250,00
		Jumlah	34.070.252.777,76	31.068.807.273,00
2	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	865.521.748,00	651.527.050,00
		Program pengelolaan pelayaran	29.887.000,00	29.807.000,00
		Jumlah	895.408.748,00	681.334.050,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Perhitungan Efisiensi Sasaran Strategis 1 adalah sebagai berikut :

1. Volume Capacity Ratio

$$\text{Efisiensi} = \frac{(186.020.202,42 \times 100\%) - 176.390.250,00}{(186.020.202,42 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 5,18\%$$

Tabel 3.15
Efisiensi Indikator Volume Capacity Ratio

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	94,82%	5,18%

2. Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi

$$\text{Efisiensi} = \frac{(33.884.232.575,34 \times 100,01\%) - 30.892.417.023,00}{(33.884.232.575,34 \times 100,01\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 8,84\%$$

Tabel 3.16
Efisiensi Indikator Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100,01%	91,17%	8,84%

Perhitungan Efisiensi Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja Persentase daerah yang terlayani transportasi umum adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{(895.408.748 \times 114\%) - 681.334.050}{(895.408.748 \times 114\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 33,25\%$$

Tabel 3.17
Efisiensi Indikator Persentase daerah yang terlayani transportasi umum

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
114%	76,09%	33,25%

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan anggaran pendapatan sebesar **Rp.802.371.150,00** dan anggaran belanja sebesar **Rp. 45.009.139.310,89**.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 meliputi realisasi pendapatan sebesar **Rp. 1.373.059.000,00** dan realisasi belanja sebesar **Rp. 40.623.840.018,00**. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar **Rp. 4.385.299.292,89**.

TUJUAN I

Tabel 3.18

Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan untuk mewujudkan konektivitas Kabupaten/ Kota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian		Pagu Rp.	Realisasi Rp.	Persentase %
1	Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas	1	Volume Capacity ratio	0,44	0,44	1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	33.661.159.083,04	30.668.444.023,00	91,11%
		2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi	99,99%	100%	2	Program pengelolaan pelayaran	409.093.694,72	400.363.250,00	97,87%
JUMLAH								34.070.252.777,76	31.068.807.273,00	91,19%
2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum		Persentase daerah yang terlayani transportasi umum	64%	73%	1	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	865.521.748,00	651.527.050,00	75,28%
				64%	73%	2	Program pengelolaan pelayaran	29.887.000,00	29.807.000,00	99,73%
JUMLAH								895.408.748,00	681.334.050,00	76,09%

Tabel 3.19

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	802.371.150,00	1.373.059.000,00	171,12	477.150.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	802.371.150,00	1.373.059.000,00	171,12	477.150.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	802.371.150,00	1.373.059.000,00	171,12	477.150.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	113.970.150,00	161.624.000,00	141,81	90.600.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	688.401.000,00	1.211.435.000,00	175,97	386.550.000,00
5	BELANJA DAERAH	45.009.139.310,89	40.623.840.018,00	90,25	45.421.783.766,00
5.1	BELANJA OPERASI	34.539.411.191,71	31.716.088.208,00	91,82	28.089.901.523,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.805.825.164,00	6.251.636.264,00	91,85	5.750.240.276,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.323.308.925,00	2.988.051.007,00	89,91	2.716.765.649,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.472.887.785,00	3.254.131.192,00	93,70	3.013.689.627,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	19.785.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	9.628.454,00	9.454.065,00	98,18	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.733.586.027,71	25.464.451.944,00	91,81	20.538.138.521,00
5.1.02.01	Belanja Barang	13.228.788.579,24	12.200.111.054,00	92,22	7.355.003.570,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.861.011.960,00	11.031.561.168,00	93,00	11.322.757.785,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.148.665.000,00	909.072.909,00	79,14	809.668.412,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	577.356.000,00	535.148.388,00	92,68	1.050.708.754,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	917.764.488,47	788.558.425,00	85,92	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	1.801.522.726,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	1.801.522.726,00
5.2	BELANJA MODAL	10.469.728.119,18	8.907.751.810,00	85,08	17.331.882.243,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.431.979.756,47	2.067.007.687,00	84,99	8.155.741.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.497.245.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	164.999.999,28	163.170.000,00	98,89	2.839.750.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.274.538,62	9.950.000,00	88,25	18.700.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	261.180.144,31	217.370.800,00	83,22	398.100.750,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	189.127.108,34	171.651.500,00	90,75	77.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	66.711.559,42	65.271.111,00	97,84	163.315.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	38.017.500,00	34.243.250,00	90,07	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.700.668.906,50	1.405.351.026,00	82,63	3.161.630.750,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	723.354.826,09	642.806.423,00	88,86	1.013.597.032,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	723.354.826,09	642.806.423,00	88,86	1.013.597.032,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.314.393.536,62	6.197.937.700,00	84,73	8.086.425.461,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	2.969.219.683,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.314.393.536,62	6.197.937.700,00	84,73	5.117.205.778,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	76.118.250,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	76.118.250,00

Sumber : *Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut*

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
4	PENDAPATAN DAERAH	802.371.150,00	1.373.059.000,00	477.150.000,00	187,76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	802.371.150,00	1.373.059.000,00	477.150.000,00	187,76
4.1.02	Retribusi Daerah	802.371.150,00	1.373.059.000,00	477.150.000,00	187,76
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	113.970.150,00	161.624.000,00	90.600.000,00	78,39
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	688.401.000,00	1.211.435.000,00	386.550.000,00	213,40
5	BELANJA DAERAH	45.009.139.310,89	40.623.840.018,00	45.421.783.766,00	(10,56)
5.1	BELANJA OPERASI	34.539.411.191,71	31.716.088.208,00	28.089.901.523,00	12,91
5.1.01	Belanja Pegawai	6.805.825.164,00	6.251.636.264,00	5.750.240.276,00	8,72
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.323.308.925,00	2.988.051.007,00	2.716.765.649,00	9,99
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.472.887.785,00	3.254.131.192,00	3.013.689.627,00	7,98
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	19.785.000,00	(100)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	9.628.454,00	9.454.065,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.733.586.027,71	25.464.451.944,00	20.538.138.521,00	23,99
5.1.02.01	Belanja Barang	13.228.788.579,24	12.200.111.054,00	7.355.003.570,00	65,87
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.861.011.960,00	11.031.561.168,00	11.322.757.785,00	(2,57)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.148.665.000,00	909.072.909,00	809.668.412,00	12,28
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	577.356.000,00	535.148.388,00	1.050.708.754,00	(49,07)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	917.764.488,47	788.558.425,00	0,00	100
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	1.801.522.726,00	(100)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	1.801.522.726,00	(100)
5.2	BELANJA MODAL	10.469.728.119,18	8.907.751.810,00	17.331.882.243,00	(48,60)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.431.979.756,47	2.067.007.687,00	8.155.741.500,00	(74,66)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	1.497.245.000,00	(100)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	164.999.999,28	163.170.000,00	2.839.750.000,00	(94,25)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.274.538,62	9.950.000,00	18.700.000,00	(46,79)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	261.180.144,31	217.370.800,00	398.100.750,00	(45,40)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	189.127.108,34	171.651.500,00	77.000.000,00	122,92
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	66.711.559,42	65.271.111,00	163.315.000,00	(60,03)
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	38.017.500,00	34.243.250,00	0,00	100
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.700.668.906,50	1.405.351.026,00	3.161.630.750,00	(55,55)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	723.354.826,09	642.806.423,00	1.013.597.032,00	(36,58)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	723.354.826,09	642.806.423,00	1.013.597.032,00	(36,58)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.314.393.536,62	6.197.937.700,00	8.086.425.461,00	(23,35)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	2.969.219.683,00	(100)
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.314.393.536,62	6.197.937.700,00	5.117.205.778,00	21,12
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	76.118.250,00	(100)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	76.118.250,00	(100)

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupatenn Tanah Laut

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 104,67% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Penguatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLI).

Melaksanakan survei volume lalu lintas secara berkala, evaluasi V/C Ratio, serta penataan arus kendaraan pada ruas-ruas prioritas guna menjaga tingkat pelayanan jalan tetap dalam kategori stabil dan tidak jenuh.

2. Peningkatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

Melanjutkan program pengadaan, pemasangan, serta pemeliharaan rambu, marka, APJ, dan perangkat pengendali lalu lintas sesuai standar teknis untuk mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi.

3. Penguatan Pengawasan dan Penertiban Parkir.

Meningkatkan intensitas patroli parkir, pembinaan juru parkir, serta optimalisasi lokasi parkir resmi guna mengurangi hambatan samping dan meningkatkan ketertiban lalu lintas sekaligus mendukung peningkatan PAD sektor perparkiran.

4. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum.

Mengoptimalkan cakupan layanan angkutan umum seperti BTS Trans Banjarbakula, Layanan Angkutan Tanah Laut (LAKATAN), Layanan Angkutan Pelajar (LANGKAR), dan Perum DAMRI, melalui evaluasi trayek, peningkatan

kualitas armada, serta pengawasan standar keselamatan untuk mempertahankan capaian zero accident.

5. Penguatan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja.

Melaksanakan monitoring dan evaluasi berbasis data terhadap indikator kinerja utama, termasuk Rasio Konektivitas dan Tingkat Keselamatan Transportasi, guna memastikan kesesuaian antara target Renstra dan realisasi tahunan.

6. Peningkatan Koordinasi Dan Kolaborasi Lintas Sektor.

Memperkuat sinergi dengan kepolisian, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan titik rawan kecelakaan, pengendalian kemacetan, serta pengembangan infrastruktur transportasi.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Transportasi.

Mendorong digitalisasi pengumpulan data lalu lintas, sistem pelaporan kinerja, serta pengembangan sistem informasi transportasi daerah guna meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Melalui strategi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan kinerja yang telah dicapai serta mengantisipasi peningkatan mobilitas dan pertumbuhan wilayah pada periode perencanaan berikutnya.

Pelihar, 13 Februari 2026
Kepala SKPD,

Tedy Mulyana, ST, MT
NIP. 19800617 200501 1 007